BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Dalam rangka menumbuhkan rasa saling pengertian antar bangsa, mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antar bangsa, saling mencukupi kebutuhan masing-masing bangsa dengan bekerja sama, memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan, membina dan menegakkan perdamaian atau ketertiban dunia tentunya hubungan internasional sangatlah penting. Suatu negara yang menolak melakukan hubungan internasional dengan negara lain, maka negara tersebut akan terkucilkan dalam pergaulan dunia. Akibatnya, negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar negara, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun pertahanan dan keamanan atau dengan kata lain dapat diartikan hubungan antar negara yang berbeda-beda dalam segala aspek. Suatu hubungan internasional ini dapat terjadi, karena terdapat faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di setiap negara, hal inilah yang dapat mendorong terjadinya kerjasama antar negara. Pentingnya hubungan internasional bagi suatu bangsa tentunya berkaitan dengan manfaat yang diperoleh dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan internasional dilaksanakan atas dasar untuk mencapai tujuan tertentu, dengan adanya tujuan-tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka

suatu hubungan internasional dianggap sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Menurut Perwita dan Mochammad Yani bahwa:

> "Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara menutup diri terhadap dunia luar." (Perwita dan Yani, 2005: 3-4).

Pada dasarnya Ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dalam artian, ilmu ini dapat menggunakan berbagai teori, konsep dan pendekatan dari ilmu studi lainnya dalam mengembangkan kajiannya. Perkembangan kajian dan ruang lingkup ilmu Hubungan Internasional dewasa ini terbilang sangat pesat. Hubungan internasional yang pada mulanya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara berdaulat, kini telah mengalami pergeseran dimana munculnya aktor-aktor lain dalam suatu hubungan internasional yang masing- masing memiliki peran yang sama penting. Aktor dari hubungan internasional tersebut bisa merupakan *state actor* maupun *non-state actor*. Dalam mempelajari Ilmu Hubungan Internasional terdapat tujuan dasar seperti yang disampaikan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochammad Yani bahwa:

> "Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional" (Perwita dan Yani, 2005: 4-5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut:

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita dan Yani, 2005: 29-34).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang bersifat dinamis yang disebabkan oleh dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Dalam hubungan internasional, hubungan atau interaksi antar negara merupakan hal yang paling mendasar untuk dipahami. Interaksi-interaksi antar negara ini dilakukan setiap negara melalui (*state actor*) dan (*non-state actor*) akibat banyaknya kompleksitas yang dihadapi masyarakat dunia internasional yang

disebut pola interaksi hubungan internasional yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional dan menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lain (Rudy, 2003:2)

2.1.2 Kerjasama Bilateral

Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan guna mencapai tujuan bersama. Bilateralisme mengacu pada hubungan politik dan budaya yang melibatkan dua negara, contohnya:

1. Penandatanganan atau perjanjian.
2. Tukar menukar Duta Besar.
3. Kunjungan kenegaraan.

Kerjasama bilateral adalah suatu kerjasama politik, budaya, pendidikan dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan kerjasama internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan besar, dan kunjungan antar negara. Alternatif dari hubungan bilateral adalah kerjasama multilateral; yang melibatkan banyak negara, dan unilateral; ketika satu negara berlaku semaunya sendiri (*freewill*) (Rudy, 2002b: 127).

Kerjasama dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Kebanyakan hubungan dan interaksi yang berbentuk kerjasama terjadi diantara dua pemerintah yang memilki kepentingan atau menghadapi masalah serupa secara bersamaan. Bentuk kerjasama lainnya dilakukan antara negara yang bernaung dalam organisasi dan kelembagaan internasional. Beberapa organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan bahwa kerjasama yang

berlangsung diantara negara anggota organisasi tersebut dilakukan atas dasar pengakuan kedaulatan nasional masing-masing negara. Kerjasama yang dilakukan antar pemerintah dua negara yang berdaulat dalam rangka mencari penyelesaian bersama terhadap suatu masalah yang menyangkut kedua negara tersebut melalui perundingan, perjanjian, dan lain sebagainya disebut sebagai kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan suatu bentuk hubungan dua negara yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik yang dimanifestasikan dalam bentuk kooperasi.

Pola kerjasama bilateral merupakan bagian dari pola hubungan aksi reaksi yang meliput proses:

1. Rangsangan atau kebijakan actual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari rangsangantersebut oleh pembuat keputusan di negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respons oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa. (Perwita dan Yani, 2005:42)

Bentuk kerjasama internasional secara bilateral lebih sering dilakukan seperti pertukaran duta besar, kunjugan kenegaraan dan penandatanganan atau perjanjian. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak (Rudy, 2002b: 127).

Seperti yang diungkapkan oleh Kishan S. Rana mengenai kerjasama bilateral bahwa:

> “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan

> keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara" (Rana, 2002: 15-16).

Jadi, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Menurut Teuku May Rudy dalam buku Studi Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin mengatakan bahwa, dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut (Rudy, 2002b: 125).

2.1.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional merupakan konsep yang paling dikenal luas di kalangan para penstudi hubungan internasional dan politik internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Hal ini terjadi selama negara bangsa (*Nation State*) masih merupkan aktor yang utama dalam hubungan internasional. Semua ahli agaknya sepakat bahwa determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional (*International Relation*) adalah kepentingan nasionalnya (Rudy, 2002b: 60).

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar

untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu:

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy, 2002a: 116).

Konsep kepentingan nasional juga mempunyai indikasi dimana negara atau state berperan sebagai aktor utama di dalam formulasi politik yang merdeka berdaulat. Selanjutnya didalam mekanisme interaksinya masing-masing negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan inilah yang akhirnya diformulasikan ke dalam konsep "*power*" kepentingan "*interest*" didefinisikan ke dalam terminologi *power* (Sitepu, 2011: 56).

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu "*power*" yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dapat dihindari akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu, 2011: 163).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan (*power*). Kekuasaan (*power*) memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan (*power*). Namun kapabilitas ini merupakan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan (*power*) yang bersifat dinamis.

Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang

dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara.

Sedangkan Coulombis dan Wolfe membagi unsur-unsur kekuatan nasional dua kategori atau penggolongan:

1. *Tangible elements* (yang konkrit nyata wujudnya dan dapat diukur)
    a. Populasi (jumlah penduduk)
    b. Luas wilayah (termasuk letak-letak geopolitik atau geostrategik)
    c. Sumber alam dan kapasitas industri
    d. Kapasitas produksi pertanian
    e. Kekuatan dan mobilitas militer
2. *Intangible elements* (tidak dapat diukur)
    a. Kepemimpinan nasional (*leadership* and *personality*)
    b. Pendayagunaan (efisiensi) organisasi-birokrasi
    c. Tipe dan gaya pemerintahan
    d. Keterpaduan masyarakat (*social cohesiveness*)
    e. Diplomasi, dukungan luar negeri, dan kebergantungan
    f. Peristiwa-peristiwa tertentu (Rudy, 2002b: 114).

Setiap negara merefleksikan sesuatu yang berbeda ketika berinteraksi dalam lingkungan internasional. Untuk menciptakan hubungan yang tertib di dunia internasional dalam pencapainnya akan tujuan-tujuan nasionalnya, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan adalah menetapkan rumusan prioritas kepentingan nasional.

Menurut Robinson, terdapat beberapa klasifikasi yang membagi kepentingan nasional yaitu:

1. *Primary Interest*, dalam kepentingan nasional ini perlindungan atas wilayah, negara, identitas politik, kebudayaan dan kelanjutan hidup bangsa terhadap berbagai gangguan dari luar. Semua negara mempunyai kepentingan ini dan sering dipertahankan dengan pengorbanan besar sehingga pencapaian kepentingan primer ini tidak pernah dikompromikan.
2. *Secondary Interest*, kepentingan selain kepentingan primer tetapi cukup memberikan konstribusi, seperti melindungi warga negara di luar negeri dan mempertahankan kekebalan diplomatik di luar negeri.
3. *Permanent Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat konstan dalam jangka waktu yang cukup lama.
4. *Variable Interest*, merupakan kepentingan yang bersifat kondisional dan dianggap penting pada suatu waktu tertentu.
5. *General Interest*, kepentingan yang diberlakukan untuk banyak negara atau untuk beberapa bidang khusus seperti dalam bidang perdagangan dan lainlain.
6. *Specific Interest*, kepentingan yang tidak termasuk kepentingan umum, namun biasanya diturunkan dari sana (Coulumbis dan Wolfe, 2004: 110).

2.1.4 Regionalisme

Istilah regionalisme berasal dari kata ‘regional’ ditambah ‘isme’. Region dalam perspektif hubungan internasional merupakan unit terkecil dari suatu negara yaitu *nation-state*. Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara (*nation-*

state) yang letaknya secara geografis berdekatan. Berdasarkan pengertian tersebut maka regionalisme dapat dimaknai secara sederhana sebagai suatu kerjasama regional. Ketidakmampuan pendekatan Globalis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dunia memunculkan suatu konsep regionalism. Region atau kawasan merupakan sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis dalam satu wilayah tertentu (Snyder, 2008: 24).

Namun, untuk menyatukan negara dalam satu kawasan kedekatan geografis saja tidaklah cukup. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa disamping kedekatan geografis, adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama sangat menentukan dalam menyatukan negara-negara satu kawasan (Hettne & Soderbaun, 2008: 67).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa syarat regionalisme memerlukan sayarat secara geografis dan struktural. Andrew Hurrell dalam tulisan yang berjudul "*The Regional Dimension in International Relations Theory*" menjelaskan bahwa karakter pembangunan tidak lagi menitikberatkan pada *power* dan kepentingan masing-masing negara. Karakteristik regionalisme cenderung tidak stabil dan tidak determinis. Interaksi yang terjadi dalam tataran regional sangat kompleks, multidimensional, dan menyangkut interaksi ekonomi, politik, serta budaya yang multiproses. Regionalisme merupakan hal yang tepat bagi wadah interaksi dalam menerima perubahan dan mengintensifkan resistensi dari tekanan kompetisi kapitalisme global. Hurrel menjelaskan bahwa regionalisme berfungsi sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Melalui institusi regional dapat memberikan peluang bagi negara-negara yang lemah dalam terciptanya "*voice*

opportunities" atau kesempatan dan hak yang sama dalam berpendapat, membuka peluang membentuk koalisi yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun koalisi baru. Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme merupakan kesempatan untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power (Fawcett, Louise, and Hurrell, 2002: 84).

Regionalisasi merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah. Kesadaran regional dan identitas menekankan adanya *sense of belonging* atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Adanya kerjasama regional terbentuk sebagai upaya untuk merespon tantangan eksternal. Dalam konsep kerjasama regional ini ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional dalam sistem internasional. Integrasi dalam suatu kawasan regional menekankan pada pengurangan atau bahkan usaha untuk menghilangkan batas antar negara. Batas antar negara yang dimaksudkan bukan batas geografis, melainkan batas interaksi seperti batasan pajak ekspor dan impor. Sedangkan pembentukan kohesi regional dilatarbelakangi adanya keinginan untuk membentuk organisasi regional yang supranasional untuk memperdalam integrasi ekonomi dan membentuk rezim serta membentuk hegemoni regional yang kuat. Regionalisme adalah seperangkat sikap, kesetiaan, dan ide-ide yang menyatukan pikiran individu dan kolektif dari masyarakat atas apa yang mereka persepsikan sebagai wilayahnya. Di dalam studi Hubungan Internasional, Regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan Studi Kawasan (*Area Studies*).

Bahkan, dalam aplikasi analisis, istilah *region* (kawasan) dengan regionalisme sering kali tumpah tindih.

Region atau kawasan adalah pengelompokan regional di identifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketegantungan ekonomi yang saling menguntungkan (Interdependensi), komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Mansbach, 2012: 43).

Regionalisme merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang kerapkali tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi. Regionalisasi tidak berdasarkan kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun bukan sekumpulan negara dan pola regionalisasi tidak harus berdasarkan batas negara. Sedangkan kesadaran regional dan identitas menekankan pada *sense of belonging* atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya (Nuraeni, Silva, dan Sudirman, 2010: 21).

2.1.4.1 *Special Economic Zone*

Dari perspektif luas, *Special Economic Zone* (SEZ) dapat dicirikan secara umum, sebagai daerah geografis dalam wilayah sebuah negara dimana kegiatan ekonomi jenis tertentu dipromosikan oleh seperangkat instrumen kebijakan yang tidak umum berlaku ke seluruh negara. Secara kelembagaan, keberadaan SEZ mencerminkan fakta bahwa pemerintah tuan rumah melakukan kebijakan ekonomi sedemikian rupa yang membedakan cara kegiatan ekonomi pada wilayah geografis tertentu dalam negara tersebut (Ge, Wei. 1999:1268).

Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi

perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. SEZ dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Pendirian SEZ sendiri dapat pula bertujuan untuk pengembangan fasilitas infrastruktur kelas dunia, penciptaan kesempatan kerja, promosi investasi dari sumber daya dalam negeri, promosi ekspor barang dan jasa, dan turunan kegiatan ekonomi tambahan lainnya. Sedangkan menurut pendapat Xu Dixin dalam kerangka teoritis, SEZ memiliki fungsi yang spesifik seperti:

1. Untuk melayani dan merupakan jembatan dalam memperkenalkan modal asing, teknologi canggih, peralatan, dan sebagai ruang pembelajaran untuk pelatihan personil yang mampu menguasai teknologi canggih;
2. Untuk mempromosikan kompetisi antar wilayah, antar perdagangan, dan juga mempromosikan sebuah perdagangan tertentu, sebagai usaha untuk akhir yang lebih besar dalam mengembangkan perekonomian negara dan mempercepat produksi serta meningkatkan kualitas manajemen;
3. Untuk menyerap devisa dan untuk menyaring bagian dari modal asing, teknologi, dan peralatan melalui SEZ;
4. Untuk melayani sebagai sebuah unit eksperimen dalam reformasi struktural ekonomi dan sebagai pendidikan untuk mempelajari *law of*

value and the regulation of production according to market demands (pengaturan produksi sesuai dengan permintaan pasar); dan

5. Untuk mempekerjakan banyak orang yang memang menunggu untuk adanya pekerjaan (Menon, 2009 : 11-42).

2.2 Kerangka Pemikiran

Secara konseptual, tujuan utama hubungan bilateral antar negara adalah membangun kemitraan yang kuat dan menciptakan hubungan persahabatan. Muara utama dari hubungan bilateral di atas adalah pencapaian kepentingan nasional baik dari sisi ekonomi, sosial, dan politik keamanan. Secara lebih spesifik, beberapa konsep utama dalam hubungan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Kerjasama antara negara baik dalam lingkup bilateral, regional dan multilateral sangat dibutuhkan oleh suatu negara, dimana suatu negara tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan negara lainnya baik dalam sektor ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Singapura adalah negara tetangga yang kerapkali menjadi harapan Indonesia tentang bagaimana sebuah pembangunan hendaknya dijalankan di negara ini. Mengingat Singapura adalah negara tetangga terdekat, Indonesia dan Singapura harus menjalin hubungan erat, harmonis, dan produktif, dalam arti saling membantu, baik secara bilateral maupun dalam kerangka ASEAN. Hubungan Indonesia dan Singapura pada awalnya dimulai dengan saling curiga, hal ini wajar disebabkan kedua negara berbeda sejarah, kepentingan, dan tujuan nasional masing-masing. Faktanya, hubungan kedua negara yang bertetangga tersebut

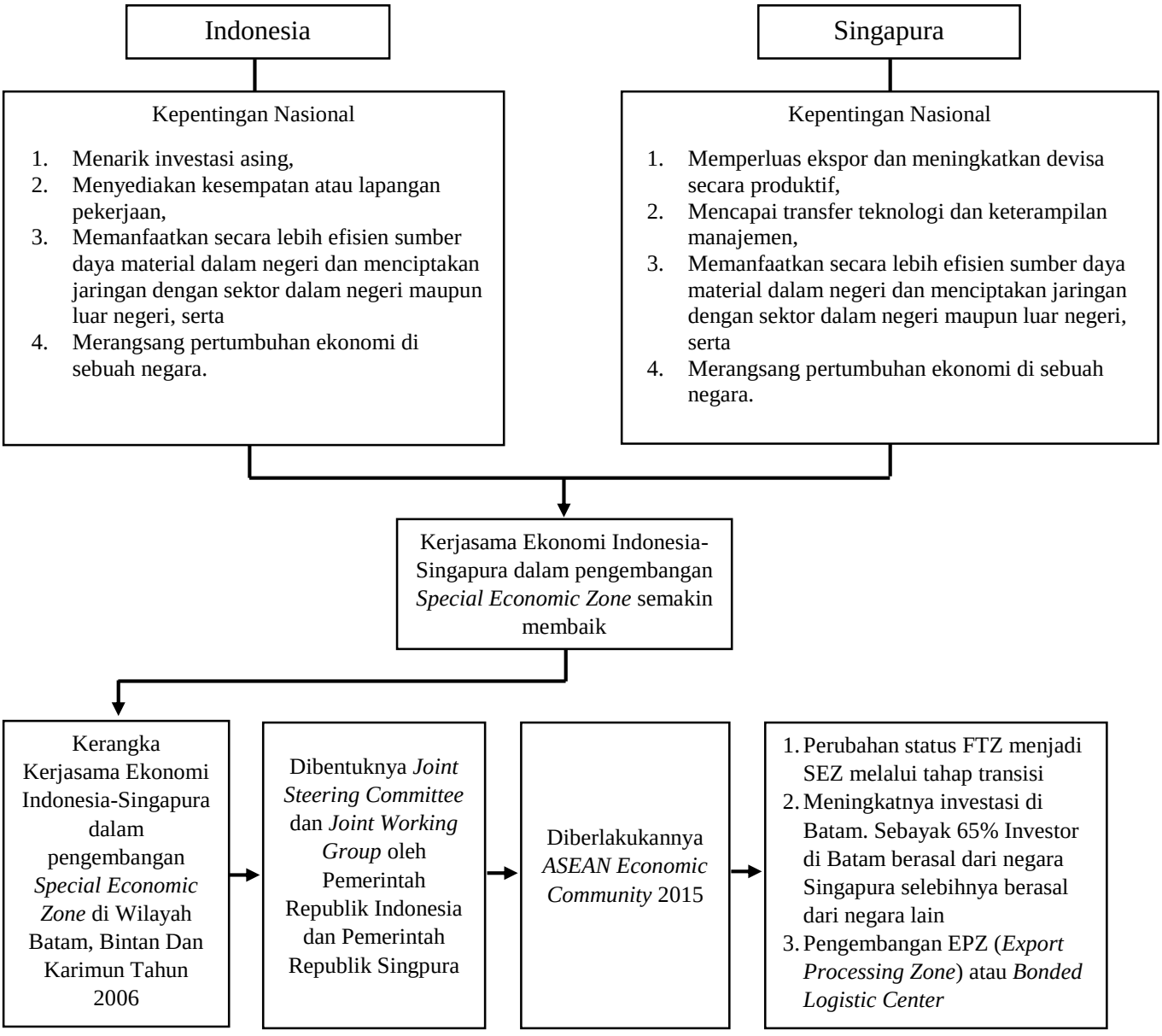
kemudian mengalami perkembangan dan kemajuan yang kondusif, sehingga kemudian tumbuh hubungan yang didasarkan atas kesadaran kedua belah pihak adanya sifat saling membutuhkan. Hubungan kerjasama antara Indonesia dan Singapura dibina bukan hanya karena faktor geografis yang berdekatan tapi juga faktor sejarah. Berbagai ranah kerjasama dibangun atas nama kepentingan negara baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Hubungan itu bisa berlangsung harmonis dan produktif bila kedua negara bisa memaksimalkan dan mempertahankan hubungan yang sudah baik, dan meminimalkan atau menghilangkan ganjalan yang masih ada. Hubungan dan kerjasama saling menguntungkan menjadi kunci yang diperlukan untuk memelihara saling ketergantungan kedua negara merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa ditawar.

Hubungan Indonesia-Singapura mempunyai arti yang sangat penting bagi kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan kawasan. Dari segi kepentingan nasional, hubungan bilateral kedua negara yang erat, produktif, dan saling menguntungkan mutlak diperlukan dan harus terus diupayakan terutama guna menciptakan lingkungan eksternal yang menunjang bagi kepentingan pembangunan nasional Indonesia. Besarnya komplementaritas kepentingan ekonomi di antara kedua negara harus secara strategis terus dikembangkan terutama dalam rangka menunjang upaya pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara itu, dari kepentingan kawasan, Indonesia dituntut untuk memberikan prioritas dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, kerja sama serta solidaritas ASEAN, dan dalam hal ini hubungan bilateral yang baik dan erat antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut.

Singapura adalah negara sahabat dan secara fisik geografis merupakan tetangga dekat Indonesia. Oleh karena itu, hubungan dan kerja sama antara kedua negara terwujud dalam berbagai bidang kehidupan, terutama yang menonjol adalah di bidang ekonomi di mana Singapura adalah mitra dagang utama, sumber investasi asing terbesar, dan juga asal wisatawan asing terbesar bagi Indonesia.

Hubungan Bilateral Indonesia Singapura telah menunjukkan peningkatan di berbagai bidang kerjasama terutama kerjasama politik, ekonomi dan sosial budaya. Selain itu kunjungan antara sesama pejabat Pemerintah maupun swasta di kedua negara telah memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan hubungan kerjasama dan peningkatan investasi di kedua negara. Kedua negara menyatakan untuk terus bekerjasama dan mempertegas komitmen mereka untuk memperkuat dan memperdalam hubunganya. Peningkatan kerjasama antara Singapura dan Indonesia merupakan peluang yang saling mengungtungkan. Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Singapura saling melengkapi dan memiliki tingkat komplementaritas yang tinggi. Indonesia memilki sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang besar sedangkan Singapura memiliki kemampuan pengetahuan dan teknologi tinggi, jaringan ekonomi serta sumber daya keuangan yang besar. Kerangka hubungan kerjasama Indonesia dan Singapura tersebut di atas, telah menjadi landasan dasar bagi pengembangan hubungan Indonesia dan Singapura yang lebih mengikat, salah satunya melalui kunjungan antara Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan kedua negara yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan susbtansial untuk meningkatkan dan mengembangkan hubungan kerjasama bilateral kedua negara.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran